

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN WELAHAN,
KABUPATEN JEPARA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

HERU SAPUTRA

L2D005365



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

ABSTRAK

Kebijakan perencanaan pembangunan secara nasional mengarah pada perencanaan partisipatif. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terus mendorong keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan melalui peraturan-peraturan daerah. Berdasarkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara diidentifikasi bahwa kemungkinan bertemunya seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, terbuka lebar pada forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam). Dengan demikian Musrenbangcam merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan partisipatif. Samsura (2003) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif yaitu adanya pelibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Musrenbangcam berfungsi sebagai forum komunikasi dan diskusi berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan keputusan kolektif. Proses untuk menghasilkan keputusan kolektif tersebut akan menciptakan interaksi timbal balik antarpemangku kepentingan, yang kemudian akan memperlihatkan seberapa jauh peran masing-masing pemangku kepentingan di dalam proses tersebut. Hal inilah yang mendasari pertanyaan penelitian “bagaimana peran pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Jepara?”

Musrenbang Kecamatan Welahan diambil sebagai studi, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji peran pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Welahan. Peran pemangku kepentingan dalam penelitian ini dikaji melalui dua variabel utama, yaitu kepentingan dan pengaruh. Pengambilan variabel tersebut atas dasar pemahaman bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai pihak-pihak (individu atau kelompok) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan pendapat Kossoudji dan Bianchi (2001), kepentingan berisi penjelasan tentang detail kepentingan dan indikasi yang menjelaskan mengapa pemangku kepentingan menyetujui atau menolak keputusan, oleh sebab itu variabel kepentingan ini akan berhubungan erat dengan alasan yang mendasari pemangku kepentingan untuk terlibat. Sedangkan pengaruh berhubungan dengan kemampuan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan, mulai dari proses awal hingga hasil akhir.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Hal ini berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan, yaitu analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan serta analisis peran pemangku kepentingan. Analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh bersumber dari kuesioner yang kemudian didukung dengan penjelasan hasil wawancara terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Welahan. Sedangkan analisis peran pemangku kepentingan merupakan penarikan kesimpulan dari analisis sebelumnya, yang kemudian akan mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan perannya dalam Musrenbangcam.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbangcam pada dasarnya merupakan sebuah proses yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang akan dibawa ke Forum SKPD dan Musrenbangkab. Dalam Musrenbang Kecamatan Welahan, yang berperan sebagai pemangku kepentingan primer yaitu perwakilan desa, perwakilan kelompok masyarakat, dan perwakilan UPT kecamatan. Kemudian yang berperan sebagai pemangku kepentingan sekunder yaitu panitia penyelenggara (fasilitator dan aparat kecamatan) dan LSM. Sedangkan yang berperan sebagai pemangku kepentingan kunci yaitu perwakilan SKPD. Jika dilihat dari segi peranan, terjadi ketidakseimbangan peranan antara pemangku kepentingan pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya yaitu kemampuan yang dimiliki pemangku kepentingan masyarakat dalam bidang perencanaan masih lemah, masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai arah perencanaan yang seharusnya dilakukan, serta secara administratif SKPD mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan prioritas usulan yang akan dibawa ke Forum SKPD dan Muerenbangkab.

Keyword: peran, pemangku kepentingan, musrenbangcam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PRIBADI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	4
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu PWK	7
1.7 Manfaat Penelitian	8
1.8 Kerangka Pemikiran	8
1.9 Metode Penelitian	9
1.9.1 Pendekatan Penelitian	9
1.9.2 Data Penelitian	9
1.9.3 Obyek, Populasi, Sampel dan Responden	13
1.9.4 Tahap Penelitian	15
1.9.5 Proses Analisis	15
1.9.6 Teknik Analisis	18
1.10 Sistematika Pembahasan	23

BAB II PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24
2.1 Perencanaan Partisipatif	24
2.2 Partisipasi Masyarakat	26
2.3 Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	29
2.4 Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	31
2.5 Sintesis Kajian Literatur	34
2.5.1 Kerangka Teoritik	34
2.5.2 Variabel Penelitian	37
 BAB III GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN JEPARA	 39
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara	39
3.1.1 Kondisi Geografis	39
3.1.2 Kependudukan	40
3.2 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	43
3.3 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara	44
3.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Welahan	50
 BAB IV PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN WELAHAN, KABUPATEN JEPARA	 58
4.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	58
4.2 Analisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Pemangku Kepentingan	62
4.2.1 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Desa	63
4.2.2 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Kelompok Masyarakat	65
4.2.3 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Unit Pelayanan Kecamatan	67
4.2.4 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh LSM	68
4.2.5 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh SKPD	70
4.2.6 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Panitia Penyelenggara	72
4.3 Analisis Peran Pemangku Kepentingan	77

BAB V PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Keaslian Penelitian	7
Tabel I.2	: Data Penelitian	11
Tabel I.3	: Rekapitulasi Hasil Wawancara	13
Tabel I.4	: Sampel Penelitian	14
Tabel I.5	: Responden Penelitian	14
Tabel I.6	: Identifikasi Pemangku Kepentingan	16
Tabel I.7	: Skor Penilaian Hirarki Secara Administratif	17
Tabel I.8	: Panduan Rekapitulasi Kuesioner 1	21
Tabel I.9	: Panduan Rekapitulasi Kuesioner 2	21
Tabel I.10	: Analisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Pemangku Kepentingan ...	22
Tabel I.11	: Pengelompokan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh	22
Tabel II.1	: Tingkatan Perenserta Pemangku Kepentingan	33
Tabel II.2	: Kerangka Teoritik	36
Tabel III.1	: Kepadatan Penduduk di Kabupaten Jepara Tahun 2006	40
Tabel III.2	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di kabupaten Jepara Tahun 2006	42
Tabel IV.1	: Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan Tahun 2009 ..	58
Tabel IV.2	: Pengelompokan Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan Berdasarkan Arah Kepentingan	60
Tabel IV.3	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Desa Berdasarkan Penilaian Internal	63
Tabel IV.4	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Desa Berdasarkan Penilaian Eksternal	64
Tabel IV.5	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Penilaian Internal	66
Tabel IV.6	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Penilaian Eksternal	66
Tabel IV.7	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Unit Pelayanan Kecamatan Berdasarkan Penilaian Internal	67
Tabel IV.8	: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Perwakilan Unit Pelayanan Kecamatan Berdasarkan Penilaian Eksternal	68

Tabel IV.9 : Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh LSM	
Berdasarkan Penilaian Internal	69
Tabel IV.10: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh LSM	
Berdasarkan Penilaian Eksternal	69
Tabel IV.11 : Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh SKPD	
Berdasarkan Penilaian Internal	70
Tabel IV.12: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh SKPD	
Berdasarkan Penilaian Eksternal	71
Tabel IV.13: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Panitia Penyelenggara	
Berdasarkan Penilaian Internal	72
Tabel IV.14: Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Panitia Penyelenggara	
Berdasarkan Penilaian Eksternal	73
Tabel IV.15 : Analisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Pemangku Kepentingan	
dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	74
Tabel IV.16: Pengelompokan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Tingkat Kepentingan	
dan Tingkat Pengaruh	74
Tabel IV.17: Karakteristik dan Analisis Peran Pemangku Kepentingan	
dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Diagram Persentase Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	5
Gambar I.2	: Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota	8
Gambar I.3	: Posisi Manfaat Penelitian	8
Gambar I.4	: Kerangka Pemikiran	10
Gambar I.5	: Proses Analisis	19
Gambar I.6	: Proses Teknik Analisis Deskriptif Komparatif	20
Gambar I.7	: Proses Teknik Analisis Pengukuran <i>Skalogram</i>	20
Gambar III.1	: Peta Administrasi kabupaten Jepara	41
Gambar III.2	: Piramida Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2006	43
Gambar III.3	: Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Jepara	46
Gambar III.4	: Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	49
Gambar III.5	: Proses Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Welahan	53
Gambar IV.1	: Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	60
Gambar IV.2	: Diagram Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	75
Gambar IV.3	: Perbandingan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan	76
Gambar IV.4	: Proses Penentuan Prioritas Usulan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan ..	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Daftar Nama Peserta Musrenbang Kecamatan Welahan Tahun 2009	88
Lampiran B : Form Kuesioner dan Hasil Rekapitulasi Kuesioner	92
Lampiran C : Form Panduan Wawancara dan Hasil Rekapitulasi Wawancara	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya model perencanaan, yang dahulunya bersifat atas ke bawah, sekarang lebih bersifat bawah ke atas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Merujuk pada undang-undang tersebut, jelas sudah bahwa perencanaan partisipatif telah menjadi agenda nasional dalam menjalankan perencanaan pembangunan.

Perencanaan partisipatif merupakan model perencanaan yang berupaya untuk melibatkan berbagai pihak guna mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Kusumahadi dalam Eriyanto (2006), salah satu prinsip dalam perencanaan partisipatif adalah melibatkan *stakeholder* (selanjutnya disebut sebagai pemangku kepentingan). Sejalan dengan pendapat Kusumahadi tersebut, Wilcox dalam Muluk (2007) menyebutkan bahwa partisipasi akan bekerja dengan baik apabila semua pemangku kepentingan puas dengan level partisipasi, tempat dimana mereka dilibatkan. Artinya semua pihak yang berkepentingan merasa bahwa hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan keputusan telah terpenuhi. Perencanaan partisipatif sebagai agenda nasional diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan agenda nasional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terus mendorong keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan melalui peraturan-peraturan daerah, diantaranya SK Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dan Surat Edaran Bupati Jepara yang berisi keharusan keterlibatan utusan SKPD pada penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Pada dasarnya, Musrenbang merupakan forum komunikasi dan diskusi berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan didefinisikan oleh Freeman dalam Sautter dan Leisen (1999) sebagai kelompok atau individual yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi. Dalam perencanaan pembangunan daerah pemangku kepentingan kemudian dapat diartikan sebagai pihak-pihak (individu atau kelompok) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Kepentingan dan pengaruh ini kemudian dapat diukur melalui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Kepentingan berhubungan erat dengan alasan yang mendasari pemangku kepentingan untuk terlibat dalam suatu kegiatan proyek atau pengambilan keputusan, sesuai dengan pendapat Kossoudji dan Bianchi (2001) yang menyatakan bahwa kepentingan berisi penjelasan tentang detail kepentingan dan indikasi yang menjelaskan mengapa pemangku kepentingan menyetujui atau menolak keputusan. Sedangkan pengaruh menjelaskan tentang kemampuan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan, mulai dari proses awal hingga hasil akhir. Oleh sebab itu, pengaruh berhubungan dengan seberapa besar kemampuan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi hasil keputusan.

Pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bersumber dari dua poros utama, yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, secara sederhana Musrenbang merupakan wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyatukan pemikiran guna menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kesempatan untuk menyatukan pemikiran tersebut terbuka lebar pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam). Hal ini dikarenakan forum Musrenbangcam merupakan wadah yang paling memungkinkan terjadinya pertemuan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) adalah forum diskusi antar utusan desa/kelurahan dengan SKPD guna mendapatkan masukan prioritas kegiatan desa/kelurahan, sinkronisasi kegiatan lintas desa/kelurahan yang selanjutnya menjadi prioritas kecamatan untuk diusulkan ke Musrenbang Kabupaten. Menurut Permendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007050/264A/SJ, forum ini seharusnya dihadiri oleh delegasi desa/kelurahan, delegasi SKPD se-Kabupaten, anggota DPRD yang berasal dari dapil kecamatan yang bersangkutan, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan, kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: kelompok petani, ojeg, nelayan, buruh, perdagangan, perempuan, serta kelompok lainnya.

Musrenbangcam yang berfungsi sebagai arena komunikasi timbal balik antara lembaga perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan keputusan kolektif. Sesuai dengan pendapat Wicaksono dan Sugiarto dalam Wijaya (2003), yang

menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif bersifat dinamis, artinya perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak, serta proses perencanaan juga berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif. Akan tetapi keputusan kolektif tersebut masih sebatas keinginan dan harapan. Berdasarkan pembahasan Musfiroh (2007), hanya sebagian kecil program usulan masyarakat melalui Musrenbangcam yang dapat diterima dan dimasukkan dalam draft Musrenbang Kabupaten Jepara, sedangkan sebagian besarnya hanya sebatas “ditampung”. Hal ini memberi kesan pelaksanaan Musrenbang sekedar basa-basi prosedural untuk bisa disebut demokrasi bagi kerakyatan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengamati proses yang terjadi dalam masyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan (Musrenbangcam) di Kabupaten Jepara.

1.2 Perumusan Masalah

Perencanaan partisipatif menurut Wicaksono dan Sugiarto dalam Wijaya (2001), merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Salah satu ciri mendasarnya yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kusumahadi dalam Eriyanto (2006), yang pada intinya mengungkapkan bahwa pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan partisipatif untuk menghasilkan suatu rencana yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Berdasarkan hal tersebut, Musrenbangcam sebagai salah satu wujud mekanisme perencanaan partisipatif pada tingkat kecamatan merupakan wadah yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan yang dilakukan melalui proses Musrenbangcam ini merupakan arena yang krusial, karena mempertemukan usulan dari tingkat desa dengan perencanaan yang telah disusun pemerintah melalui SKPD di tingkat kabupaten, serta juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan pembangunan kecamatan. Pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan ini tentu akan membentuk suatu proses diskusi dan tarik menarik kepentingan karena adanya persamaan ataupun perbedaan pendapat. Dengan adanya proses diskusi tersebut, diharapkan hasil perencanaan pada tingkat kecamatan ini akan menjadi dasar yang kuat untuk dibawa pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, hal tersebut hingga saat ini masih sebatas harapan. Kenyataan yang selama ini terjadi, diungkapkan oleh Maftuh (2008) bahwa dalam Musrenbangcam di Kabupaten Jepara banyak kepentingan yang belum terakomodasi, sehingga hasilnya pun belum mencerminkan aspirasi pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Menurut Samsura dalam Maftuh (2008), salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif yaitu adanya pelibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Akan tetapi tidak cukup sekedar keterlibatan secara menyeluruh, lebih lanjut lagi Allport dalam Sastropetro (1988) menyebutkan seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Artinya, untuk mencapai hasil yang optimal harus ada kesungguhan dari setiap pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menjalankan peranannya dalam Musrenbangcam. Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini menyimpulkan pertanyaan, *“bagaimana peran pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Jepara?”*

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dengan mengambil studi Musrenbangcam di Kabupaten Jepara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran penelitian meliputi:

1. Identifikasi pemangku kepentingan dalam Musrenbangcam.
2. Analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan dalam Musrenbangcam.
3. Analisis peran pemangku kepentingan dalam Musrenbangcam berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Jepara secara keseluruhan memiliki permasalahan yang hampir sama terkait dengan pelaksanaan Musrenbangcam, seperti yang dikemukakan dalam studi Maftuh (2008). Permasalahan tersebut yaitu mekanisme Musrenbangcam sebagai bentuk perencanaan partisipatif belum mampu mengakomodasi aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan kondisi demikian, penelitian ini mengambil salah satu kecamatan sebagai wilayah obyek studi. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan peneliti, seperti keterbatasan waktu dan biaya. Akan tetapi, pertimbangan paling mendasar dipilihnya salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu karena permasalahan yang terjadi dalam Musrenbangcam hampir serupa.

Penelitian ini kemudian mengambil Kecamatan Welahan sebagai wilayah studi. Kecamatan Welahan relatif lebih kecil dengan kecamatan lainnya, yaitu ketiga terkecil di Kabupaten Jepara dengan luas 27,6 km² yang terbagi menjadi 15 desa, serta tingkat kepadatannya kedua terbesar di Kabupaten Jepara berdasarkan data BPS tahun 2006. Kecamatan Welahan memiliki penduduk yang heterogen dari jenis mata pencaharian. Hal ini tidak terlepas dari posisi

perencanaan partisipatif. Beberapa penjelasan mengenai definisi operasional yang terkait dengan lingkup materi dalam penelitian ini yaitu:

- Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang di suatu peristiwa, juga perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Kemudian peranserta diartikan ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif. Sedangkan menurut Korten dalam Indrawati (2007) peranserta adalah suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan akan berhasil dengan baik apabila ada kepercayaan bersama. Berdasarkan pemahaman tersebut, kemudian peran dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai keputusan bersama.

- Pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan diartikan oleh Freeman dalam Sautter dan Leisen (1999) sebagai kelompok atau individual yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi. Dalam perencanaan pembangunan daerah pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai pihak-pihak (individu atau kelompok) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah daerah melalui SKPD ataupun unit pelaksana, lembaga legislatif, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam masyarakat (LSM).

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan membandingkan beberapa penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dan ciri khas penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dapat dijadikan sebagai usaha untuk mengurangi plagiatisme. Beberapa hal yang penting diketahui dalam keaslian penelitian adalah lokasi, teknik analisis, variabel, dan hasil penelitian ataupun hasil yang diharapkan. Penelitian mengenai peran pemangku kepentingan sebelumnya telah beberapa kali dilakukan oleh mahasiswa jurusan perencanaan wilayah dan kota. Akan tetapi, secara keseluruhan belum ada yang membahas tentang peran pemangku kepentingan dalam hal perencanaan pembangunan daerah dengan mengambil studi Musrenbangcam di Kabupaten Jepara. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pemangku kepentingan sebagai berikut.

**TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN**

Judul/Lokasi	Nama Peneliti	Tahun	Metode Penelitian	Hasil
Studi Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Sarana Prasarana Rekreasi Wisata di Rowo Jombor Kabupaten Klaten	Winarsih	2004	Deskriptif Kualitatif Kuantitatif	Peran masing-masing <i>stakeholder</i> dalam Pengembangan Sarana Prasarana Rekreasi Wisata di Rowo Jombor Kabupaten Klaten
Peranserta <i>Stakeholder</i> dalam Revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya	Yanthi Lydia Indrawati	2007	Deskriptif Kualitatif Deskriptif Komparatif Metode Pembobotan	Bentuk peranserta <i>stakeholder</i> dalam revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta
Peran <i>Stakeholder</i> dalam Upaya Penciptaan Efisiensi Kolektif pada Klaster Jambua Air Merah Delima di Kabupaten Demak	Helly Sepsiana	2008	Kualitatif	Peran <i>Stakeholder</i> dalam Upaya Penciptaan Efisiensi Kolektif pada Klaster Jambua Air Merah Delima di Kabupaten Demak
Peran Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan (Studi: Musrenbang Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara)	Heru Saputra	2009	Kualitatif Kuantitatif	Peran Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan (Studi: Musrenbang Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara)

Sumber: *Identifikasi Penyusun, 2009*

1.6 Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu PWK

Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses yang sinergis dan multisektor merupakan bagian dari bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dalam konteks pembangunan daerah, maka perencanaan lebih cenderung mengarah pada perencanaan wilayah. Hal ini disebabkan karena kecenderungan yang terjadi, pembahasan mengenai pembangunan daerah lebih berorientasi pada pembangunan yang dimulai dari wilayah pedesaan.

Perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu perencanaan dari atas dan perencanaan dari bawah. Perencanaan dari atas merupakan bentuk perencanaan yang datang dari pemerintah yang dituangkan melalui rencana strategis pemerintah. Sedangkan perencanaan dari bawah merupakan bentuk perencanaan partisipatif yang datang dari masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang terjadi belakangan ini pada dasarnya menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pembahasan diatas, maka posisi penelitian partisipasi pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan dapat digambarkan seperti pada Gambar I.2.

1.8 Kerangka Pemikiran

Penjelasan penelitian secara ringkas terdapat pada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibuat untuk menstrukturkan rangkaian penelitian agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini bertolak dari kondisi pada masa otonomi daerah, dimana pemerintah berupaya untuk mendorong perencanaan partisipatif, mulai dari tingkat nasional sampai daerah melalui mekanisme Musrenbang. Musrenbangcam di Kabupaten Jepara merupakan forum antar pemangku kepentingan yang memungkinkan semua pemangku kepentingan terlibat di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangcam melalui dua variabel utama, yaitu kepentingan dan pengaruh. Sehingga hasil akhirnya nanti diharapkan diketahui bagaimana peran pemangku kepentingan tersebut. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini secara lengkap terdapat pada Gambar I.4.

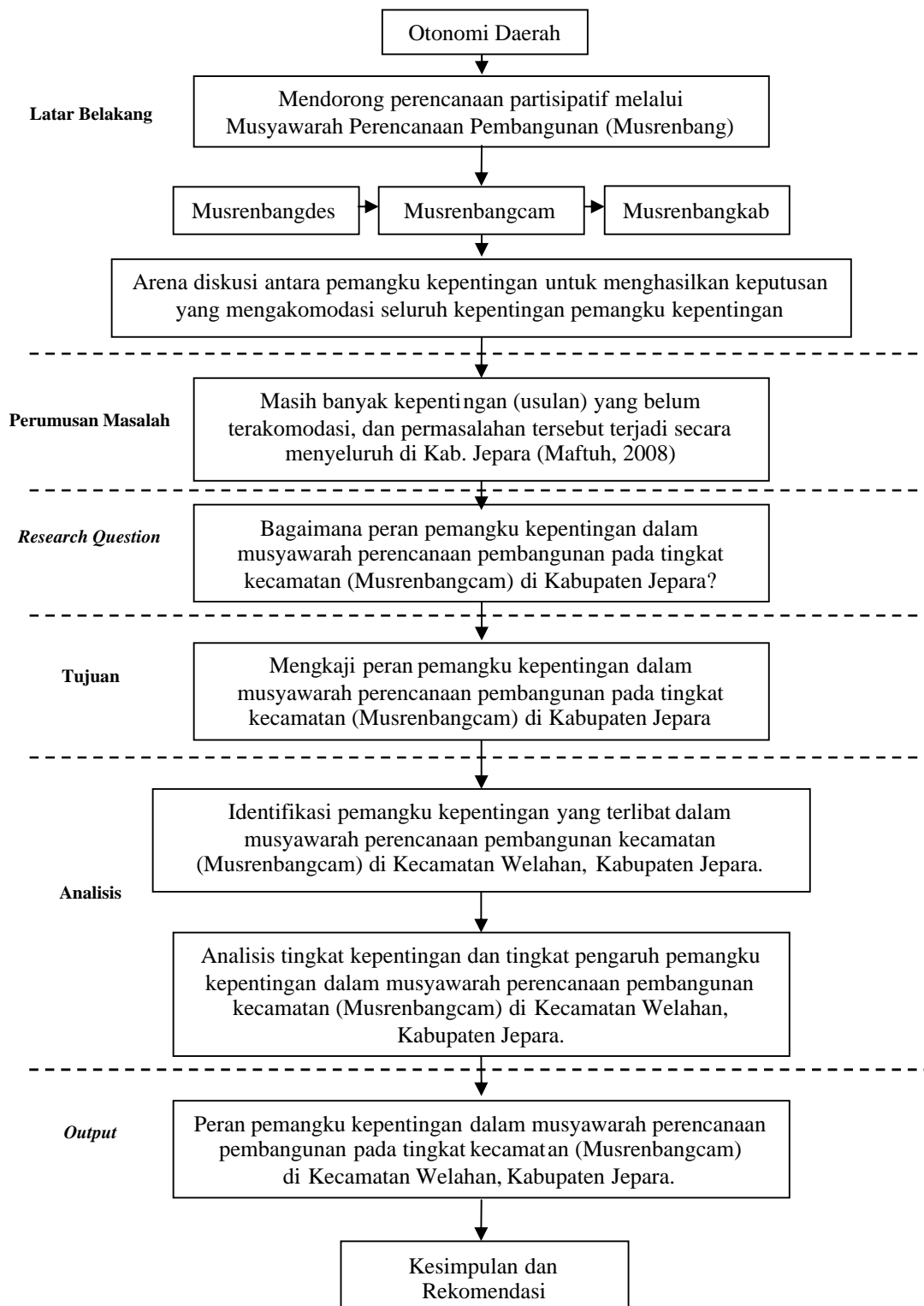
1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan campuran memiliki keunggulan karena kedua pendekatan ini saling melengkapi. Menurut Sumantri dalam Usman (2001), penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan keakuratan dalam kegiatan prediksi dan kontrol. Pemilihan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini juga terkait dengan data dan analisis. Penelitian ini masuk ke dalam rumpun penelitian sosial yang mengharuskan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan yang mengikuti proses Musrenbang Kecamatan Welahan. Oleh sebab itu data-data yang akan digunakan dalam analisis bersifat kualitatif. Akan tetapi, untuk memudahkan proses analisis dan memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka beberapa data kemudian diterjemahkan ke dalam angka yang sifatnya kuantitatif, yang kemudian disajikan melalui proses tabulasi dan analisis. Sedangkan data lainnya yang tidak dapat diterjemahkan kedalam angka tetap dianalisis secara kualitatif.

1.9.2 Data Penelitian

Secara keseluruhan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang sifatnya kualitatif. Data-data tersebut berupa dokumen, serta data hasil wawancara dan kuesioner yang bersumber langsung dari responden penelitian. Adapun kebutuhan data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I.2.



Sumber: Analisis Penulis, 2009

Gambar I.4
Kerangka Pemikiran

1. Pengumpulan data primer, dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.

▪ Kuesioner

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, kuesioner ini langsung ditujukan pada pihak pemangku kepentingan yang bersangkutan, yang terdiri dari panitia penyelenggara, perwakilan desa/kelurahan, perwakilan dinas-dinas, anggota DPRD dari dapil Kecamatan Welahan, Perwakilan UPT Kecamatan Welahan, perwakilan kelompok masyarakat, dan LSM yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Welahan. Dalam penelitian ini, kuesioner dilakukan dua kali dengan penilaian dua arah, yaitu dari sisi internal dan sisi eksternal. Penilaian dua arah ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih baik.

Kuesioner 1 : kuesioner yang ditujukan pada pemangku kepentingan yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan dari segi internal. Oleh sebab itu, pertanyaan kuesioner pun merupakan pertanyaan seputar kondisi pemangku kepentingan terkait dengan variabel yang diteliti. Setiap jawaban dari pertanyaan tersebut memiliki skor yang akan menjadi dasar penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu kelompok pemangku kepentingan. (Lampiran 1)

Kuesioner 2 : kuesioner yang ditujukan pada satu pemangku kepentingan untuk menilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu kelompok pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu pemangku kepentingan dari segi eksternal (sudut pandang pemangku kepentingan lainnya). Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pada kuesioner 2 ini melalui angka yang skalatis, dengan memberikan penjelasan pada responden sesuai variabel penelitian. (Lampiran 2)

▪ Wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua tujuan, pertama untuk mengetahui penjelasan seputar pelaksanaan musrenbang, kedua untuk memperjelas keterangan mengenai kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Wawancara kepada responden terpilih dilakukan langsung oleh peneliti dengan panduan form wawancara sesuai dengan variabel penelitian. Form wawancara ini berfungsi untuk menjaga agar wawancara tidak keluar dari jalur, artinya peneliti mengontrol pembicaraan. Hasilnya wawancara kemudian akan diolah melalui proses tabulasi dan pengkodean data untuk memperoleh penjelasan yang diharapkan. Adapun proses tersebut sebagai berikut.

TABEL I.3
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

Responden Nama Posisi/kedudukan Hasil Wawancara	Kode
.....	a.../b.../c...
.....	
.....	
.....	

Sumber: *Penyusun, 2009*

Keterangan kode:

- a : menunjukkan jenis informasi yang diberikan serta cara perolehan data/informasinya
- b : menunjukkan nomor urutan responden
- c : menunjukkan letak alenia

Pengkodean data merupakan langkah awal dalam menyiapkan data mentah yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kode dibuat dengan mencerminkan sumber pengumpulan data dan sumber satuan data. Setelah proses pengkodean data, selanjutnya dilakukan kategorisasi data. Output pada proses ini adalah terkelompokkannya data pada kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kategori data dalam penelitian ini adalah:

- Kategori A: berisi penjelasan mengenai pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Welahan
 - Kategori B: berisi penjelasan yang berhubungan dengan variabel kepentingan.
 - Kategori C: berisi penjelasan yang berhubungan dengan variabel pengaruh.
2. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mencari data dan informasi yang berupa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa peraturan, draf hasil Musrenbang dan tulisan-tulisan tentang Musrenbang di Kabupaten Jepara yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui survei ke instansi atau lembaga yang memiliki hubungan dengan Musrenbang, serta dapat juga dilakukan dengan browsing melalui internet.

1.9.3 Obyek, Populasi, Sampel dan Responden

Obyek penelitian menjelaskan tentang hal-hal yang diteliti. Menurut Kountur (2007), obyek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, sistem dan prosedur, dan fenomena. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian yaitu pihak-pihak pemangku kepentingan. Sedangkan populasi diartikan sebagai suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang menjadi perhatian

1.9.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan diawali dengan identifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangcam melalui data-data sekunder. Proses identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, untuk melengkapi dan memperkuat identifikasi juga dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbangcam seperti pihak kecamatan, perwakilan dari instansi pemerintah (SKPD), dan perwakilan kelompok masyarakat. Hasilnya adalah daftar nama pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangcam yang telah dikelompokkan sesuai dengan posisinya dalam Musrenbangcam.

Tahap selanjutnya setelah identifikasi pemangku kepentingan yaitu menentukan sampel responden untuk kuesioner dan wawancara (pengumpulan data primer). Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa sampel dan responden ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah penentuan sampel dan responden barulah proses pengumpulan data primer dapat dilakukan, yaitu melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pemangku kepentingan.

Setelah semua data terkumpul, tahap berikutnya adalah rekapitulasi data yang kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan analisis data. Data-data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan diolah dan ditabulasikan lebih lanjut. Adapun data-data sekunder dan hasil wawancara akan digunakan untuk menunjang kelengkapan data dan mempertajam analisis. Adapun proses analisis secara lengkap terdapat pada uraian berikut.

1.9.5 Proses Analisis

Analisis akan dilakukan melalui beberapa proses. Proses tersebut diawali dengan identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Welahan. Setelah proses identifikasi, kemudian dilakukan analisis mengenai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan. Adapun proses analisis dalam penelitian ini secara lengkap sebagai berikut.

1. Identifikasi pemangku kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangcam merupakan langkah awal penelitian. Pemangku kepentingan yang diidentifikasi yaitu pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbangcam. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk Tabel I.6.

TABEL I.6
IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

TIM PENYELENGGARA	
PANITIA	FASILITATOR TINGKAT KECAMATAN
PESERTA	
PERWAKILAN DESA/KELURAHAN	PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT
NARASUMBER	
TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT KECAMATAN

Sumber: *Penyusun, 2009*

2. Analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan

Peran pemangku kepentingan dalam penelitian ini dilihat dari dua variabel utama, yaitu kepentingan dan pengaruh. Peran tersebut akan diketahui melalui proses analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh masing-masing pemangku kepentingan yang kemudian didukung oleh berbagai penjelasan. Tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh memiliki andil besar dalam menentukan peran yang dijalankan oleh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, analisis ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui peran pemangku kepentingan. Analisis ini dilakukan atas dasar data-data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang memuat informasi dasar untuk menentukan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh sesuai dengan variabel. Hasil analisis ini berupa tinggi atau rendahnya kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan yang akan dinilai dengan menggunakan indikator-indikator. Adapun indikator untuk menilai tingkat kepentingan suatu pemangku kepentingan yaitu :

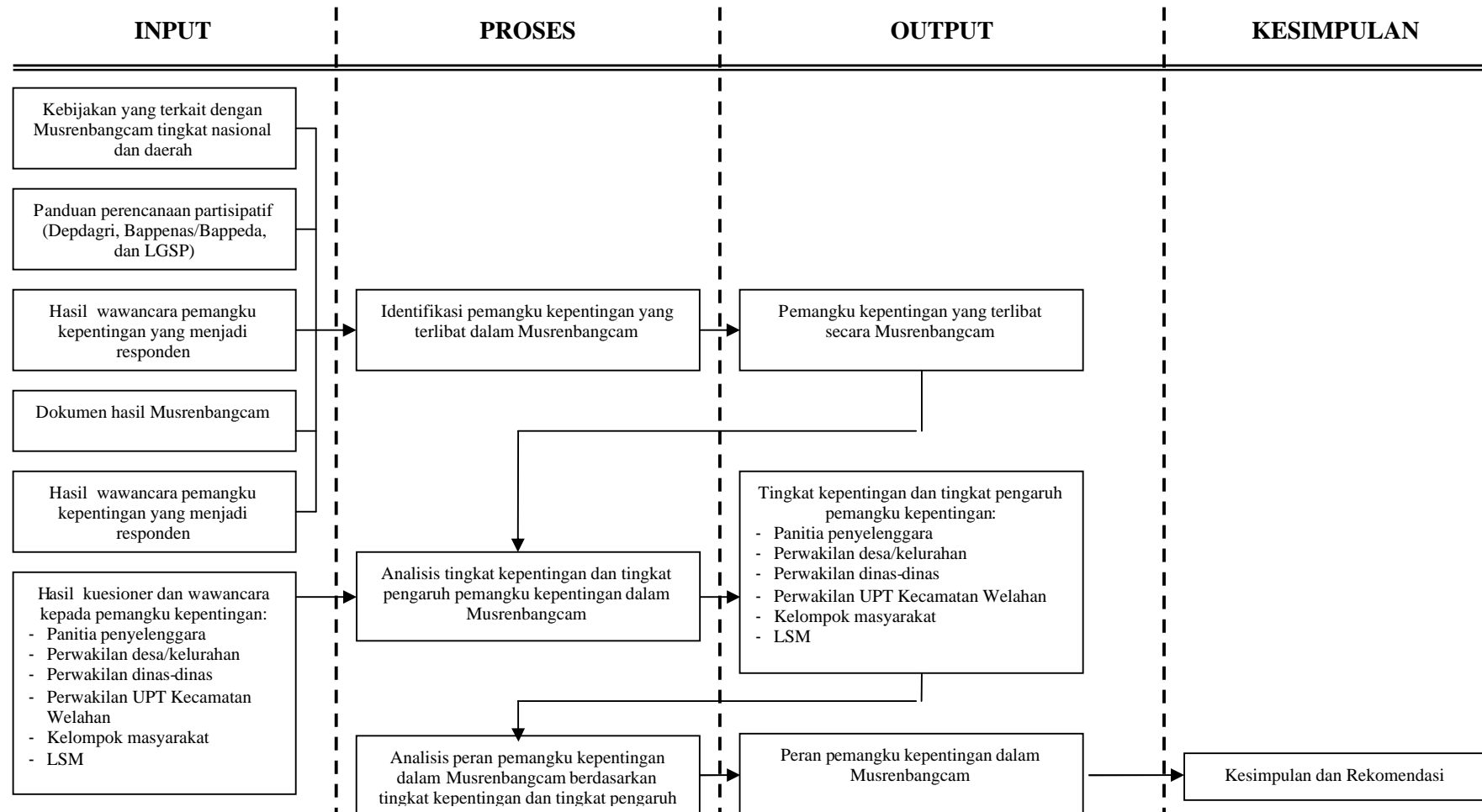
- Tujuan atau alasan keterlibatan dalam Musrenbangcam, berhubungan erat dengan alasan yang mendasari suatu pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Musrenbangcam. Alasan tersebut dapat bersumber dari pemangku kepentingan itu sendiri (kesadaran intern) untuk terlibat karena memang memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang harus dijalankan melalui Musrenbangcam. Selain itu, alasan tersebut juga dapat bersumber dari luar, misalnya karena adanya dorongan pihak-pihak tertentu ataupun bisa juga karena kondisi yang dipaksakan, misalnya hanya untuk memenuhi undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin tinggi tingkat kesadaran (kesadaran intern) pemangku kepentingan, maka semakin tinggi pula nilai skornya.
- Pengaruh atau dampak yang akan dirasakan oleh pemangku kepentingan terhadap keputusan yang diambil dalam Musrenbangcam. Hal ini berhubungan dengan seberapa

- Kontrol terhadap pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan erat dengan posisi secara administratif, dimana posisi tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk mempengaruhi keputusan akhir dalam Musrenbangcam. Oleh sebab itu, tabel tersebut dapat juga dijadikan panduan untuk memberikan penilaian. Akan tetapi, penilaian sesungguhnya diharapkan merupakan cerminan yang benar-benar terjadi.
 - Kepemilikan dan akses terhadap informasi merupakan faktor pendukung yang penting dalam Musrenbangcam. Kepemilikan dan akses terhadap informasi disini mencerminkan pentingnya suatu pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Musrenbangcam karena memiliki informasi atau data yang tidak dimiliki oleh pemangku kepentingan lainnya, serta mencerminkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menerima ataupun memberikan informasi yang berkaitan dengan Musrenbangcam. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin penting informasi yang dimiliki dan semakin mudah akses informasi suatu pemangku kepentingan, maka nilai skornya akan semakin besar.
 - Kapasitas pemangku kepentingan berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tersebut. Hal ini dapat didasari oleh pendidikan, keahlian, pengetahuan, serta pengalaman, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan.
3. Analisis peran pemangku kepentingan dalam Musrenbangcam
- Analisis peran pemangku kepentingan dalam Musrenbangcam ini dilakukan atas dasar analisis sebelumnya. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh serta penjelasan yang ada didalamnya, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai peran pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan.

Proses analisis ini pada dasarnya dilakukan guna mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan (Musrenbangcam) di Kabupaten Jepara. Secara keseluruhan, proses analisis terangkum dalam proses analisis penelitian pada Gambar I.5.

1.9.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data memiliki pengaruh yang besar terhadap ketepatan hasil analisis. Penggunaan teknik analisis yang tepat akan menghasilkan analisis yang tepat dan sebaliknya. Sehingga kualitas suatu hasil penelitian dapat dinilai dari ketepatan teknik analisis yang digunakan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

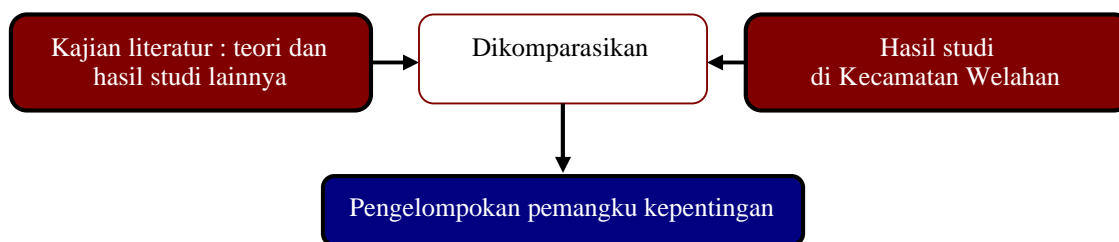


Sumber: *Analisis Penyusun, 2009*

Gambar I.5
Proses Analisis

1. Deskriptif komparatif

Teknik deskriptif komparatif dilakukan pada tahap identifikasi pemangku kepentingan, dimana pemangku kepentingan dikelompokkan berdasarkan arah kepentingannya. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan hasil studi di Kecamatan Welahan dengan teori dan hasil studi lainnya yang telah dipelajari. Sehingga hasil akhirnya yaitu teridentifikasinya kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Welahan.

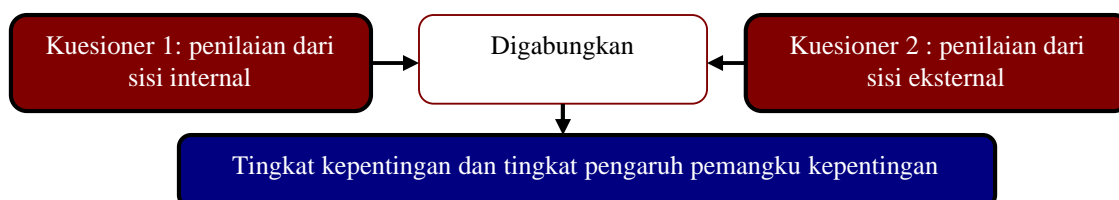


Sumber: Penyusun, 2009

Gambar I.6
Proses Teknik Analisis Deskriptif Komparatif

2. Teknik pengukuran dengan *skalogram* (skala ordinal)

Teknik ini berhubungan erat dengan analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan. Hal ini terkait dengan data yang diperoleh dari hasil kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk menilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dirancang dengan tipe jawaban yang berskala, yaitu 1 – 5, dengan keterangan sangat, rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut disusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang akan menjadi dasar penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan proses pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan sebagai berikut.



Sumber: Penyusun, 2009

Gambar 1.7
Proses Teknik Analisis Pengukuran *Skalogram*

Kemudian secara keseluruhan, hasil rekapitulasi kuesioner 1 dan kuesioner 2 digabungkan untuk mencari nilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu pemangku kepentingan. Nilai tersebut akan diperoleh dengan menggunakan rumus:

Keterangan :

$$N = (K1 + K2) / 2$$

N = nilai tingkat kepentingan / tingkat pengaruh
(1 – 5 / sangat rendah – sangat tinggi)

K1 = skor rata-rata kuesioner 1

K2 = skor rata-rata kuesioner 2

Hasilnya kemudian ditabulasikan kembali seperti yang terlihat pada Tabel I.8 dan Tabel I.9. Hal ini dilakukan untuk memperjelas hasil yang diperoleh, serta memudahkan pembacaan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh untuk analisis selanjutnya.

TABEL I.10
ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT PENGARUH
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan	Tingkat Kepentingan				Tingkat Pengaruh			
	K1	K2	Nilai $\frac{(K1 + K2)}{2}$	Ket	K1	K2	Nilai $\frac{(K1 + K2)}{2}$	Ket
1.								
2.								
3.								
4. dst								

Sumber: Penyusun, 2009 diadaptasi dari Rietbergen-McCracken,1962

TABEL I.11
PENGELOMPOKAN PEMANGKU KEPENTINGAN
BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT PENGARUH

Tingkat Pengaruh	Tingkat Kepentingan				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sangat Rendah					
Rendah					
Sedang					
Tinggi					
Sangat Tinggi					

Sumber: Penyusun, 2009 diadaptasi dari Rietbergen-McCracken,1962

3. Deskriptif kuantitatif

Teknik analisis ini berkaitan erat dengan analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan yang menghasilkan angka-angka seperti yang dijelaskan diatas. Angka-angka tersebut pada dasarnya memiliki makna tertentu. Oleh sebab itu teknik analisis ini digunakan, untuk menjelaskan makna angka-angka tersebut. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis yang berupa pemaparan yang dilakukan untuk menjelaskan dengan benar bagaimana masing-masing variabel penelitian berjalan di lapangan, sehingga menghasilkan angka-angka tertentu. Pemaparan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap makna dari angka-angka yang dihasilkan yang kemudian didukung oleh hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kecamatan Welahan.

1.10 Sistematika Pembahasan

Penelitian peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan ini akan dibahas dalam lima bagian yang dibagi kedalam bab-bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, posisi penelitian dalam bidang ilmu PWK, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kemudian mengupas kajian literatur yang berkaitan dengan konsep perencanaan partisipatif, teori dan studi-studi mengenai pemangku kepentingan dan perannya dalam perencanaan pembangunan. Pembahasan pada bab II ini mulai dari yang bersifat teoritis, hingga studi-studi di tempat lain yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

Bab III berisi tentang gambaran umum Kabupaten Jepara sebagai wilayah studi, mulai dari kondisi geografis, gambaran mengenai kependudukan, hingga pada kondisi pemerintahan.. Selain itu, pada bab ini juga diberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Jepara, sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Bab IV selanjutnya akan berbicara banyak mengenai hasil penelitian, yang mencakup hasil survei dan analisis-analisis yang dilakukan. Pembahasan pada bab ini dimulai dari proses identifikasi pemangku kepentingan dan dilanjutkan pada analisis tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis peran pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian ini, berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Penarikan kesimpulan dilakukan atas dasar hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV. Kesimpulan tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemangku kepentingan secara keseluruhan.